

PERAN PEREMPUAN NELAYAN BULUTUI DALAM EKONOMI KELUARGA

Sarah Syakirah

Email: sarah.syakirah@iain-manado.ac.id

IAIN Manado

Aisyah

Email: aisyah@iain-manado.ac.id

IAIN Manado

Walinda Lanari

Email: walinda.lanari@iain-manado.ac.id

IAIN Manado

Rigan Lakoro

Email: rigan.lakoro@iain-manado.ac.id

IAIN Manado

Abstract

This study aims to explore the roles of women fishers in Bulutui Village, North Minahasa Regency, within the social, economic, and ecological dynamics of coastal communities. Using a mixed-method approach through three days of observations and interviews, the research reveals that women fishers hold significant dual roles as household managers and productive economic actors in the fisheries sector. They engage in fishing activities, post-harvest processing, fish farming, and small-scale businesses based on marine products. These contributions serve as a crucial foundation for household economic resilience amid seasonal fluctuations and income uncertainty. Adaptive strategies such as economic diversification particularly bobara fish farming and food processing demonstrate the innovative capacity of women in maintaining economic stability. The study also highlights the high level of women's involvement in village governance, where nearly 70% of structural positions are occupied by women, including leadership in the Village Consultative Body and social-religious organizations. However, challenges persist, including limited access to capital, training, and persistent socio-environmental issues such as low educational participation and marine pollution practices. This research affirms that women fishers in Bulutui are strategic actors in strengthening the local economy, managing coastal resources, and advancing sustainable village development. Therefore, gender-responsive empowerment policies are needed to enhance the capacity and welfare of coastal women.

Keywords: *women fishers, double role, coastal economy, economic diversification, fish farming, women empowerment, seasonal uncertainty, village governance, sustainable development.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran perempuan nelayan di Desa Bulutui, Kabupaten Minahasa Utara, dalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat pesisir. Dengan menggunakan metode campuran melalui observasi dan wawancara selama tiga hari, penelitian ini menemukan bahwa perempuan nelayan memegang peran ganda yang signifikan, yakni sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai pelaku ekonomi produktif di sektor perikanan. Mereka terlibat dalam aktivitas melaut, pengolahan hasil tangkapan, budidaya ikan, hingga pengelolaan usaha kecil berbasis hasil laut. Kontribusi ini menjadi penopang penting bagi ketahanan ekonomi keluarga di tengah fluktuasi musim dan ketidakpastian pendapatan. Strategi adaptif melalui diversifikasi ekonomi, seperti budidaya bobara dan produksi makanan olahan, menunjukkan kapasitas inovatif perempuan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan tingginya tingkat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, di mana sekitar 70% jabatan struktural diisi oleh perempuan, termasuk posisi ketua BPD dan pengurus lembaga sosial-keagamaan. Namun demikian, perempuan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap permodalan, pelatihan, serta ketimpangan sosial dan lingkungan, seperti rendahnya partisipasi pendidikan dan kebiasaan membuang sampah ke laut. Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan nelayan di Bulutui merupakan aktor strategis dalam penguatan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya pesisir, serta pembangunan desa berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemberdayaan yang responsif gender untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan perempuan pesisir.

Kata Kunci: perempuan nelayan, peran ganda, ekonomi pesisir, diversifikasi ekonomi, budidaya ikan, pemberdayaan perempuan, ketidakpastian musim, pemerintahan desa, pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Desa Bulutui merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 746 jiwa, terdiri dari 364 laki-laki dan 382 perempuan, desa ini menggantungkan perekonomiannya secara dominan pada sektor perikanan. Sebagai masyarakat maritim, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, baik dalam kegiatan penangkapan ikan di laut maupun budidaya perikanan. Posisi geografis Bulutui yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan aktivitas kelautan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran signifikan yang sering kali tidak tampak di permukaan, namun berpengaruh besar terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi sosial-geografis ini menjadi latar penting untuk memahami bagaimana struktur ekonomi lokal membentuk dan dipengaruhi oleh

kontribusi aktif perempuan dalam rumah tangga dan komunitas pesisir (Cahyani, 2023).

Perempuan nelayan di Desa Bulutui memainkan peran ganda yang sangat penting dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku ekonomi produktif (Saptari, 2000). Di satu sisi, mereka menjalankan tugas-tugas domestik seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan menjaga keharmonisan keluarga; di sisi lain, mereka aktif terlibat dalam kegiatan perikanan seperti melaut, budidaya ikan, hingga pengolahan dan penjualan hasil laut. Kedua peran ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan menopang satu sama lain dalam membentuk sistem penghidupan keluarga yang adaptif. Peran ganda ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya “pendamping” laki-laki, melainkan aktor utama yang memiliki kontribusi nyata dalam ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan atas kerja perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, sebagai bagian integral dari keberlangsungan hidup masyarakat pesisir (Arivia, 2006).

Kehidupan ekonomi perempuan nelayan di Desa Bulutui sangat dipengaruhi oleh musim yang tidak menentu, sehingga pendapatan keluarga sering kali tidak stabil. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, perempuan menunjukkan peran adaptif dengan mengatur strategi ekonomi rumah tangga, seperti menjual hasil laut, menjalankan usaha kecil, atau mengelola budidaya ikan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana perempuan menjadi aktor utama dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah tantangan alam dan fluktuasi pendapatan (Malikussaleh, 2024).

Diversifikasi ekonomi menjadi strategi utama perempuan nelayan di Desa Bulutui dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan dari sektor perikanan tangkap yang bersifat musiman. Mereka tidak hanya bergantung pada hasil laut, tetapi juga mengembangkan usaha budidaya ikan, produksi makanan olahan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis sumber daya lokal (Samawa, 2024). Strategi ini menunjukkan kapasitas perempuan dalam mengelola ekonomi keluarga secara fleksibel dan inovatif, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara komunitas perempuan pesisir. Diversifikasi tersebut bukan sekadar bentuk

bertahan hidup, melainkan juga bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan (CFI, 2025).

Perempuan nelayan di Desa Bulutui tidak hanya aktif dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan desa (IFREL, 2023). Mereka menduduki posisi strategis seperti Ketua BPD, pengurus majelis taklim, dan tokoh masyarakat, yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Keterlibatan ini mencerminkan bentuk pemberdayaan yang melampaui ranah domestik, serta mengindikasikan adanya perubahan sosial yang mendorong kesetaraan gender di tingkat komunitas (Putri, 2024).

Isu sosial dan lingkungan menjadi tantangan yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat pesisir di Desa Bulutui, di mana perempuan nelayan berada pada posisi strategis dalam menghadapinya (Yistiriani, 2025). Rendahnya partisipasi pendidikan anak, praktik membuang sampah ke laut, serta minimnya kesadaran ekologis menjadi masalah yang menghambat pembangunan berkelanjutan (Nurlaili, 2024). Meskipun perempuan telah berkontribusi besar dalam pengelolaan rumah tangga dan ekonomi, keterlibatan mereka dalam isu-isu lingkungan dan transformasi sosial masih belum sepenuhnya diakui atau difasilitasi secara struktural.

Saat ini, ketika mendengar kata “nelayan”, mayoritas masyarakat akan membayangkan bahwa nelayan adalah seorang atau sekelompok laki-laki yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan (Sari, 2023). Namun dalam menjelaskan definisi nelayan, kita dapat mengacu ke UU RI No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dimana telah dijelaskan pada BAB 1 Pasal 1 Poin 3 bahwa definisi nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pendefinisian ini tak mencantumkan gender, yang berarti definisi tersebut berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan. Dalam artikel ini, penulis fokus membahas nelayan perempuan, melihat konteks saat ini masih belum ada yang melakukan penelitian tentang perempuan nelayan di Bulutui. (Najoan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan menggunakan data angka perempuan nelayan di Bulutui, dan menjelaskan hubungan data-data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan mengenai bagaimana kehidupan dan situasi sehari-hari perempuan nelayan di Desa Bulutui (Wardhani & Susilowati, 2023). Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kontribusi perempuan nelayan Desa Bulutui dalam kegiatan perikanan, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan peran ganda (*double role*), sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pengelola ekonomi dalam keluarga. (Padriana, 2023).

Dari hasil wawancara dan observasi selama 3 hari 2 malam yang kami lakukan di Bulutui dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2025, kami mengetahui bahwa jumlah perempuan nelayan di Desa Bulutui hanya 3 orang, yaitu Ibu Surtini, Ibu Maswati, dan Ibu Irma. Ketiga perempuan yang kami wawancarai sama-sama bekerja sebagai nelayan pencari ikan *mai-mai* (teri) musiman diantara mereka (ibu Irma dan ibu Maswati) memiliki usaha budidaya ikan *bobara* (kuwe gerong) menggunakan kerambah (jaring apung) Diluar itu, kami juga mewawancarai dua narasumber lain yang merupakan istri nelayan, yaitu ibu Husna dan ibu Kismi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga dan Perikanan

Perempuan nelayan di Desa Bulutui memperlihatkan peran ganda yang kompleks namun sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Mereka menjalankan dua fungsi utama sekaligus, yakni sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai pelaku ekonomi produktif dalam sektor perikanan. Kedua peran ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan membentuk sistem penghidupan keluarga yang adaptif di wilayah pesisir. Di satu sisi, perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Ini terlihat dalam narasi Ibu Husna dan Ibu Kismi yang menekankan aktivitas rumah tangga sebagai kegiatan utama sehari-hari, sebelum atau sesudah mereka menjalankan kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, mereka juga terlibat aktif dalam

kegiatan perikanan tangkap, budidaya ikan dalam keramba, serta produksi dan penjualan hasil laut.

Misalnya, Ibu Irma, Ibu Surtini, dan Ibu Maswati adalah contoh nyata perempuan yang tidak hanya ikut melaut bersama suami, tetapi juga menjalankan kegiatan pasca-tangkap seperti penjemuran, pengemasan, hingga penjualan. Mereka memiliki peran langsung dalam menentukan hasil ekonomi rumah tangga dari sektor perikanan. Aktivitas ini bahkan dijalankan dalam waktu yang tidak tetap, tergantung pasang surut air laut, sehingga menuntut fleksibilitas dan ketahanan fisik yang tinggi. Penggunaan alat sederhana seperti jaring, sepatu boots, dan senter menunjukkan keterbatasan teknologi, namun tidak menghalangi partisipasi aktif perempuan. Fakta bahwa perempuan ikut melaut bersama suami dan bekerja di sektor budidaya menunjukkan bahwa konsep nelayan tidak lagi identik dengan laki-laki. Sebaliknya, telah terjadi perluasan makna nelayan yang mencakup perempuan sebagai subjek aktif. Ini penting untuk dicatat dalam kebijakan kelautan dan perikanan, yang selama ini cenderung mengabaikan kontribusi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan menjadi "aktor tak terlihat" (invisible actors) dalam statistik dan program-program perikanan, padahal mereka memainkan peran vital dalam rantai produksi perikanan lokal.

Dalam perspektif teori *gender and kerja reproduktif-produktif*, peran ganda perempuan ini menunjukkan bagaimana perempuan bekerja di dua ruang sekaligus: ruang domestik (kerja reproduktif) dan ruang publik/ekonomi (kerja produktif). Meskipun keduanya penting, kerja reproduktif sering kali tidak diakui secara ekonomi, padahal menopang kerja produktif yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam sektor perikanan bukan hanya sebagai pendamping suami, tetapi sebagai *breadwinner* atau pencari nafkah utama dalam banyak kasus. Lebih jauh, peran ganda ini juga menunjukkan kapasitas adaptif perempuan dalam menghadapi ketidakpastian hidup di wilayah pesisir. Musim ikan yang tidak menentu, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar membuat ekonomi rumah tangga nelayan rentan. Perempuan kemudian mengambil posisi strategis untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh Ibu Maswati dan Ibu Kismi dengan menjual hasil laut langsung dari rumah atau menerima pesanan sesuai permintaan.

Tingginya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi ini turut memperkuat posisi sosial mereka dalam komunitas. Sejumlah perempuan juga mengambil peran kepemimpinan di pemerintahan desa, seperti ketua BPD atau ketua kelompok majelis taklim, yang menunjukkan pengakuan sosial terhadap kontribusi dan kapasitas mereka. Hal ini berbanding lurus dengan teori *feminist political ecology*, yang menekankan bahwa perempuan memiliki pengetahuan lokal dan strategi adaptasi yang kuat dalam mengelola sumber daya alam, dan karena itu harus diberikan dukungan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perlu dicatat bahwa peran ganda ini juga membawa konsekuensi berupa beban kerja yang tinggi. Perempuan harus mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan produktif, dan kegiatan sosial. Ketiadaan dukungan struktural, seperti akses terhadap alat tangkap modern, modal usaha, dan pelatihan teknis, membuat perempuan bekerja dalam keterbatasan. Hal ini juga diperparah oleh bias gender dalam akses terhadap bantuan dan program-program pemerintah, yang umumnya lebih memprioritaskan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa perempuan nelayan bukan hanya “pendamping” laki-laki, melainkan subjek utama dalam sistem ekonomi pesisir. Peran ganda mereka bukanlah bentuk subordinasi, melainkan cerminan dari resiliensi, kreativitas, dan kepemimpinan perempuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga dan komunitas.

Musim dan Ketidakpastian Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan dan perempuan nelayan di Desa Bulutui, sangat dipengaruhi oleh pola musim yang tidak menentu. Ketergantungan pada musim tangkap ikan menjadikan pendapatan mereka sangat fluktuatif, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian ekonomi yang terus-menerus. Perempuan nelayan di desa ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga aktor yang merespons langsung dinamika ekonomi musiman tersebut melalui berbagai strategi adaptasi. Secara umum, musim penangkapan ikan, terutama ikan teri atau *teri medan*, terjadi hanya satu hingga dua kali dalam sebulan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Surtini. Waktu tangkap sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan kondisi cuaca, yang bisa berubah setiap saat. Akibatnya, aktivitas melaut tidak bisa direncanakan secara pasti, dan hasil tangkapan pun tidak

selalu menjanjikan. Dalam kondisi demikian, perempuan dituntut untuk fleksibel dan mampu beradaptasi dengan jadwal kerja yang cair dan tidak teratur, baik dalam kegiatan melaut maupun budidaya.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan nelayan hidup dalam situasi ekonomi yang bersifat *seasonal livelihood*, yaitu mata pencaharian yang bergantung pada musim dan kondisi alam. Istilah ini merujuk pada jenis penghidupan yang tidak berlangsung secara konsisten sepanjang tahun, dan memiliki risiko tinggi terhadap fluktuasi pendapatan, yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga. Ketika musim ikan tiba, seperti yang dialami oleh Ibu Irma dan Ibu Maswati, mereka akan melaut bersama suami untuk menangkap ikan, terutama ikan teri. Namun ketika musim tidak menguntungkan atau cuaca buruk, maka mereka hanya dapat mengandalkan hasil budidaya ikan dalam keramba, atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Dalam situasi tertentu, seperti yang diceritakan oleh Ibu Kismi, kadang-kadang suami pulang dari laut tanpa membawa hasil tangkapan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga pun menjadi kesulitan.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya *kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan*—situasi di mana ketidakpastian penghasilan berdampak pada kestabilan konsumsi, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketika nelayan tidak mendapatkan hasil laut, perempuan menjadi aktor utama yang mengelola sisa sumber daya yang ada: mengatur pengeluaran, menjual simpanan hasil laut, atau membuka usaha rumahan kecil-kecilan seperti produksi olahan ikan dan makanan ringan. Dalam konteks ini, teori *livelihood vulnerability* dari Chambers dan Conway (1992) menjadi relevan. Mereka mendefinisikan kerentanan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk menghadapi tekanan atau gangguan, baik jangka pendek (seperti musim paceklik atau cuaca buruk) maupun jangka panjang (seperti perubahan iklim atau degradasi lingkungan). Di Bulutui, ketidakstabilan musim tangkap dan keterbatasan akses terhadap teknologi tangkap modern menjadi faktor yang memperkuat kerentanan ini.

Perempuan nelayan merespons kondisi ini dengan berbagai strategi diversifikasi ekonomi, seperti budidaya rumput laut, budidaya ikan bobara dalam

keramba, atau menjual ikan teri dalam berbagai bentuk (mentah, setengah kering, dan kering). Strategi ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi pesisir bersifat musiman dan tidak menentu, perempuan tetap berusaha menciptakan stabilitas ekonomi melalui kerja keras dan inovasi lokal. Namun demikian, upaya ini tidak selalu membawa hasil. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maswati, mahalnya harga pakan ikan membuat aktivitas budidaya kadang menimbulkan kerugian. Artinya, tidak semua strategi adaptasi berhasil meredam dampak ketidakpastian ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan justru menanggung beban ganda: bekerja lebih keras di tengah kondisi alam yang tidak menentu, dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa dukungan struktural yang memadai.

Di sisi lain, aspek ketidakpastian ini juga memengaruhi struktur sosial dalam rumah tangga. Perempuan yang mengelola ekonomi keluarga sering kali menjadi figur sentral dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Mereka yang berhasil menavigasi kondisi ini tidak hanya memperoleh otonomi ekonomi, tetapi juga meningkatkan posisi sosial mereka di dalam komunitas. Dalam banyak kasus, mereka menjadi teladan bagi perempuan lain dalam mengelola usaha kecil, menyiasati hasil tangkapan yang minim, hingga menciptakan jaringan penjualan ikan lokal. Namun tetap saja, ketidakpastian ekonomi akibat musim yang tidak menentu memerlukan perhatian dari pihak luar, khususnya pemerintah dan lembaga pemberdayaan. Dibutuhkan intervensi seperti pelatihan adaptasi iklim, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, akses pembiayaan mikro, hingga diversifikasi mata pencarian yang terintegrasi dengan potensi lokal.

Dengan demikian, musim dan ketidakpastian ekonomi bukan hanya tantangan teknis yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Bulutui, tetapi juga merupakan struktur sosial-ekonomi yang membentuk dan membatasi ruang gerak mereka. Di tengah kondisi tersebut, perempuan tetap menunjukkan kapasitas adaptif yang luar biasa, meskipun keberhasilan mereka masih sangat tergantung pada dukungan kebijakan yang berpihak dan responsif terhadap realitas gender di wilayah pesisir.

Budidaya dan Diversifikasi Ekonomi

Dalam konteks kehidupan masyarakat pesisir seperti di Desa Bulutui, diversifikasi ekonomi merupakan strategi penting dalam menghadapi

ketidakpastian pendapatan dari sektor perikanan tangkap yang bersifat musiman. Perempuan nelayan di desa ini tidak hanya menggantungkan kehidupan pada hasil tangkapan laut, tetapi juga mengembangkan berbagai bentuk usaha sampingan dan budidaya sebagai bentuk adaptasi ekonomi yang responsif terhadap perubahan alam dan sosial. Budidaya ikan, khususnya jenis bubara putih (*Caranx ignobilis*) dan tadipang, menjadi pilihan utama sebagian besar perempuan nelayan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Irma, Ibu Surtini, dan Ibu Maswati, aktivitas ini berlangsung secara rutin setiap hari, mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan keramba, hingga proses panen. Budidaya ini memberi peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dibandingkan dengan melaut yang bergantung pada musim dan kondisi cuaca. Dalam praktiknya, budidaya ikan dijalankan dengan memanfaatkan keramba apung di laut, dengan pakan berupa ikan kecil hasil tangkapan atau yang dibeli dari pasar.

Namun, budidaya ini bukan tanpa tantangan. Ibu Maswati, misalnya, mengungkapkan bahwa ketersediaan pakan ikan kerap menjadi kendala utama. Saat tidak ada ikan kecil untuk pakan, ia harus membeli pakan dengan harga yang cukup tinggi, yang terkadang menyebabkan kerugian ekonomi. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam sistem budidaya skala kecil yang bergantung pada rantai pasok lokal yang rapuh dan belum terintegrasi dengan sistem pendukung produksi yang kuat. Selain budidaya ikan, diversifikasi ekonomi juga dilakukan melalui kegiatan lain seperti produksi makanan olahan. Ibu Husna, contohnya, mengembangkan usaha pembuatan bakso ikan dan keripik pisang coklat sebagai bentuk pemanfaatan hasil laut dan sumber daya lokal. Usaha ini berawal dari pelatihan yang diberikan oleh program WCS (Wildlife Conservation Society) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan pesisir. Meskipun akhirnya Ibu Husna mundur dari program tersebut, ia tetap melanjutkan usaha secara mandiri dan berhasil menjual produknya hingga menjadi pemasok bagi pihak luar, termasuk tamu asing di Manado. Kisah ini memperlihatkan bahwa program pemberdayaan yang berbasis keterampilan dapat menjadi pemicu munculnya inisiatif ekonomi yang berkelanjutan jika disertai semangat individu dan dukungan keluarga.

Model diversifikasi ini mencerminkan strategi adaptif perempuan dalam merespons tantangan ekonomi yang bersifat struktural. Dalam literatur ekonomi

komunitas pesisir, strategi semacam ini dikenal sebagai *multiple livelihood strategies* atau strategi penghidupan beragam, yaitu upaya rumah tangga untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sumber agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor yang berisiko tinggi. Dalam kasus Bulutui, perempuan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga perencana ekonomi keluarga. Mereka melakukan perhitungan terhadap waktu, tenaga, dan modal untuk menentukan usaha mana yang paling memungkinkan dijalankan dalam situasi tertentu. Diversifikasi ini juga memiliki dimensi sosial. Aktivitas seperti budidaya dan usaha olahan seringkali dilakukan dalam jaringan kerja yang melibatkan anggota keluarga, tetangga, atau kelompok perempuan. Praktik ini bukan hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di komunitas pesisir. Perempuan saling berbagi pengetahuan, berbagi alat, atau bahkan saling membantu saat panen atau produksi. Dengan demikian, diversifikasi ekonomi juga menjadi jalan menuju penguatan modal sosial di desa.

Namun, masih terdapat hambatan yang menghalangi optimalisasi diversifikasi ekonomi ini. Akses terhadap permodalan, pelatihan lanjutan, teknologi sederhana, dan pasar yang stabil masih menjadi tantangan besar. Banyak perempuan, seperti Ibu Kismi dan Ibu Maswati, harus menjalankan usahanya secara mandiri dengan modal terbatas dan keterampilan yang sebagian besar diperoleh secara otodidak atau turun-temurun. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pemberdayaan masih bersifat sporadis, belum menjangkau seluruh perempuan, dan tidak semua program berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari sisi kebijakan, pendekatan yang dibutuhkan adalah *gender-sensitive economic empowerment*, yaitu program pemberdayaan ekonomi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan realitas hidup perempuan nelayan. Diversifikasi ekonomi di desa pesisir seperti Bulutui harus dilihat bukan sebagai pilihan alternatif, tetapi sebagai strategi utama dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga dan komunitas. Terutama di era perubahan iklim yang membawa dampak besar pada keberlanjutan sektor perikanan tangkap.

Secara keseluruhan, budidaya dan diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan nelayan di Bulutui bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga mencerminkan kapasitas inovatif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan

manajerial yang layak diakui secara sosial maupun struktural. Dengan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai bentuk usaha, perempuan pesisir menjadi pilar penting dalam penguatan ekonomi lokal, sekaligus agen perubahan dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan dan Keterlibatan dalam Pemerintahan Desa

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa di Bulutui. Fenomena ini memperlihatkan bentuk pemberdayaan perempuan yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup partisipasi politik, sosial, dan kepemimpinan komunitas. Dalam konteks masyarakat pesisir yang secara historis dan struktural sering kali didominasi oleh laki-laki, keterlibatan aktif perempuan dalam pemerintahan desa menjadi indikasi perubahan sosial yang signifikan. Sebagaimana tercermin dalam narasi Ibu Surtini dan beberapa narasumber lainnya, perempuan di Desa Bulutui tidak hanya menjadi bagian dari komunitas pasif, melainkan menduduki posisi-posisi strategis seperti Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua kelompok keagamaan seperti majelis taklim, serta tokoh masyarakat yang turut memengaruhi arah kebijakan lokal. Bahkan dalam struktur pemerintahan desa secara keseluruhan, sekitar 70% jabatan diisi oleh perempuan. Ini merupakan angka yang luar biasa mengingat dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan desa di banyak wilayah lain di Indonesia.

Dominasi perempuan dalam perangkat desa menunjukkan bahwa pemberdayaan di Bulutui bukan sekadar jargon, melainkan telah membentuk sistem sosial-politik yang inklusif. Perempuan memiliki ruang, otoritas, dan pengakuan formal untuk mengambil keputusan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *gender mainstreaming* dalam pembangunan, yang mendorong partisipasi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan desa juga memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. Mereka tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan perempuan dalam

program-program seperti WCS (Wildlife Conservation Society) dan PMPM (Program Mandiri Pangan dan Mandiri) menunjukkan bahwa mereka tidak hanya responsif terhadap persoalan lokal, tetapi juga terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi dengan pihak luar.

Namun, pemberdayaan ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Sebagaimana disinggung oleh para narasumber, masih terdapat kekurangan dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian perangkat perempuan belum memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang memadai untuk mengelola program-program desa secara optimal. Hal ini menjadi ironi di tengah kuantitas partisipasi perempuan yang tinggi, namun tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas keterampilan, literasi digital, dan akses terhadap pelatihan kepemimpinan. Masalah ini tidak semata-mata bersumber dari perempuan itu sendiri, melainkan dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan informasi yang relevan. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang *capacity building-oriented*. Artinya, pemberdayaan tidak cukup hanya memberi ruang partisipasi, tetapi harus dibarengi dengan investasi dalam peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan. Tanpa hal tersebut, partisipasi perempuan bisa menjadi simbolis dan tidak berdampak pada perubahan struktural yang lebih luas.

Perempuan yang duduk dalam struktur pemerintahan juga dihadapkan pada tantangan sosial-kultural yang masih kuat. Di beberapa kasus, seperti yang ditunjukkan dalam studi ini, masih ada anggapan bahwa posisi perempuan dalam kepemimpinan publik hanyalah sebagai pendamping atau pelengkap. Oleh karena itu, perempuan yang berani tampil di ruang publik sering kali harus menghadapi tekanan sosial, skeptisme, bahkan beban ganda—karena tetap dituntut mengelola rumah tangga dengan baik. Di sisi lain, peran perempuan dalam pemerintahan desa memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan berbasis kebutuhan komunitas. Mereka membawa perspektif khas yang lebih sensitif terhadap isu-isu keseharian, seperti akses air bersih, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga pengelolaan lingkungan. Misalnya, perempuan menjadi tokoh penting dalam mendukung gerakan “Cinta Air, Tanah, dan Laut” yang dicanangkan oleh Bupati Minahasa Utara sebagai gerakan cinta lingkungan yang berbasis lokal.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa di Bulutui bukan hanya wujud dari keterbukaan sistem, tetapi juga hasil dari proses sosial yang mengakui pengalaman dan pengetahuan perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa. Mereka bukan hanya subjek pembangunan, tetapi juga penentu arah pembangunan. Dalam perspektif teori *empowerment* yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan mencakup tiga dimensi: *resources* (akses terhadap sumber daya), *agency* (kemampuan membuat pilihan dan mengambil keputusan), dan *achievement* (hasil nyata dari keputusan tersebut). Dalam konteks Bulutui, perempuan telah mengakses sumber daya (misalnya posisi jabatan dan pelatihan), menunjukkan agensi (mengambil peran kepemimpinan), dan meraih pencapaian (menjadi aktor penting dalam tata kelola desa). Namun demikian, pemberdayaan ini perlu dikawal agar tidak stagnan di level formalitas, dan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, kolaborasi, serta perubahan norma sosial yang lebih inklusif.

Isu Sosial dan Lingkungan

Isu sosial dan lingkungan merupakan dua aspek yang saling terkait erat dalam kehidupan masyarakat pesisir, termasuk di Desa Bulutui. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun terdapat praktik-praktik pemberdayaan dan partisipasi yang cukup baik, namun masih terdapat berbagai tantangan sosial dan ekologis yang menghambat keberlanjutan pembangunan desa. Perempuan nelayan, sebagai bagian penting dari komunitas ini, berada pada posisi strategis dalam menghadapi dan mengelola isu-isu tersebut.

5.1. Isu Sosial: Pendidikan, Ketimpangan Akses, dan Partisipasi Generasi Muda

Salah satu isu sosial paling menonjol yang muncul dari wawancara adalah rendahnya partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Seperti diceritakan oleh Ibu Surtini dan Ibu Kismi, banyak anak yang berhenti sekolah meskipun sudah mendapatkan bantuan pendidikan, seperti paket perlengkapan sekolah. Ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Bulutui bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang. Fenomena ini bisa dilihat dari kacamata *kemiskinan struktural*, di mana kondisi ekonomi yang terbatas, minimnya akses terhadap informasi, dan lemahnya

dukungan sosial menyebabkan anak-anak tidak memiliki motivasi atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa, terutama dalam menyiapkan generasi muda yang mampu meneruskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan inovatif. Ketika pendidikan tidak menjadi prioritas, maka regenerasi tenaga kerja terampil pun menjadi terhambat, dan masyarakat akan terus bergantung pada praktik ekonomi tradisional yang rentan terhadap perubahan zaman dan iklim. Di sisi lain, peran sosial perempuan sebagai pengelola rumah tangga menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam pendidikan anak. Namun, dengan beban ganda dan tekanan ekonomi yang tinggi, tidak semua perempuan mampu memberikan pendampingan optimal terhadap pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan generasi.

5.2. Isu Lingkungan: Degradasi Ekosistem Laut dan Perilaku Sosial

Masalah lingkungan juga menjadi sorotan penting. Salah satu praktik yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat adalah membuang sampah ke laut, sebagaimana diakui oleh narasumber. Kebiasaan ini tentu menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Selain mencemari air dan mengganggu habitat ikan, perilaku ini juga bertentangan dengan semangat konservasi dan keberlanjutan yang sedang digalakkan melalui program-program seperti WCS atau gerakan “Cinta Air, Tanah, dan Laut”. Ironisnya, degradasi lingkungan ini terjadi bersamaan dengan semakin terbatasnya hasil tangkapan dan kerusakan habitat alami seperti mangrove dan terumbu karang. Hal ini memperkuat analisis bahwa terdapat *missing link* antara pengetahuan lokal dan kesadaran ekologis. Artinya, meskipun masyarakat menggantungkan hidup pada laut, mereka belum sepenuhnya menyadari atau memahami dampak jangka panjang dari praktik yang tidak ramah lingkungan. Peran perempuan dalam konteks ini sangat penting, mengingat mereka adalah pengguna dan pengelola sumber daya alam dalam skala rumah tangga, seperti pengolahan ikan, pengelolaan sampah domestik, dan budidaya ikan. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam isu-isu lingkungan masih belum terlembagakan secara formal. Program-program lingkungan yang ada belum

sepenuhnya mengintegrasikan perspektif dan pengalaman perempuan sebagai agen konservasi yang potensial.

5.3. Konstruksi Sosial dan Dinamika Perubahan

Dalam konteks sosial yang lebih luas, muncul pula tantangan terkait dengan struktur budaya dan nilai yang masih menghambat transformasi sosial yang lebih progresif. Misalnya, masih terdapat pemisahan antara kerja “laki-laki” dan “perempuan” yang memengaruhi pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya dan akses terhadap pelatihan serta teknologi. Perempuan yang ingin aktif dalam program pelatihan atau pengambilan keputusan masih menghadapi hambatan normatif dan kultural, meskipun mereka sudah banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi. Namun demikian, gerakan-gerakan lokal seperti yang dilakukan oleh perempuan yang tergabung dalam WCS, maupun kepemimpinan perempuan dalam struktur pemerintahan desa, menunjukkan bahwa ada ruang perubahan yang terbuka. Mereka dapat menjadi jembatan antara perubahan nilai, peningkatan kesadaran ekologis, dan pemberdayaan komunitas melalui pendekatan berbasis komunitas dan keluarga.

5.4. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Jika dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, desa Bulutui sedang berada dalam fase transisi yang kritis. Di satu sisi, ada praktik lokal yang potensial untuk dikembangkan menjadi sistem ekonomi ekologis berbasis masyarakat. Namun di sisi lain, tantangan sosial dan lingkungan yang belum tertangani secara struktural dapat merusak fondasi keberlanjutan itu sendiri. Ketimpangan pendidikan, degradasi lingkungan, serta minimnya literasi ekologis dan digital menjadi faktor-faktor penghambat yang harus dijawab melalui pendekatan kebijakan yang integratif. Dengan demikian, isu sosial dan lingkungan di Desa Bulutui bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam masyarakat pesisir Indonesia. Perempuan nelayan yang selama ini menjadi pilar dalam menjaga ekonomi keluarga juga dapat menjadi pionir dalam membangun ekosistem sosial dan ekologis yang lebih adil dan berkelanjutan, jika diberikan akses, pelatihan, dan pengakuan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurfaida, N., Hamuni, H., Hadara, A., & Wardani, A. K. (2024). Aktivitas Kemaritiman Masyarakat Menui di Desa Buranga 1960-2021. *Journal Idea of History*, 7(1), 54–63.
- Cahyani, A. M., Suhaeni, S., Sondakh, S. J., Longdong, F. V., & Rantung, S. (2023). Taraf hidup rumah tangga nelayan penangkap gurita di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Akulturasi: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11(1), 19–27.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- CFI Indonesia. (2025, April). *Pemberdayaan Ekonomi Biru: Replikasi Best Practice Proyek CFI Indonesia melalui Diversifikasi Olahan Perikanan bagi Perempuan Nelayan dan Keluarganya di Morotai*.
- FREL Research. (2023). *Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Menembus Batas Struktural dan Budaya dalam Proses Pembangunan Partisipatif*. *Jurnal Riset Pembangunan WidyaKarya*, 4(2), 67–78.
- Putri, R. D. (2024). *Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa di Tengah Budaya Patriarkal: Studi Kasus di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci*. *Jurnal Parlementer*, 2(1), 45–60.
- Saptari, R. (2000). *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Yistiarani, W. D. (2025). *Perempuan nelayan: (Masih) minim pengakuan dan perlindungan di tengah ancaman krisis lingkungan*. Sajogyo Institute.
- Nurlaili, & Muhartono, R. (2024). Peran perempuan nelayan dalam usaha perikanan tangkap dan peningkatan ekonomi rumah tangga pesisir Teluk Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 19(1), 47–58.
- Sari, D. P., & Widiastuti, R. (2023). Perempuan nelayan dan identitas yang terpinggirkan dalam pembangunan kelautan. *Jurnal Perempuan dan Pembangunan*, 10(1), 55–68.
- Najoan, C. (2023). *Pemetaan sosial perempuan nelayan di Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh. (2024). *Peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga: Studi pada keluarga nelayan di Dewantara Aceh Utara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 5(1). Universitas Malikussaleh.
- Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Samawa. (2024). *Pemberdayaan perempuan nelayan melalui pelatihan diversifikasi produk perikanan di Desa Labuhan Kuris, Sumbawa*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM UNSA*.

Wardhani, A. A., & Susilowati, I. (2023). Empowerment of gender-based small-scale fishers to strengthen the coastal economy: Case study Batang Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 575–581.

Padriana, P. (2023). *Strategi pemberdayaan keluarga nelayan (sebuah analisis peran ganda istri nelayan perikanan tangkap dalam meningkatkan pendapatan keluarga) di pesisir pantai Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).